

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	60	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	%	12	Laporan	60	Laporan	1,00	%
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	10	Laporan	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	%	2	Laporan	10	Laporan	1,00	%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	1.250.000	obyek pajak	964.236	obyek pajak	241.353	obyek pajak	246.602	obyek pajak	102,17	%	241.353	obyek pajak	1.205.589	obyek pajak	0,96	%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	45	dokumen	36	dokumen	9	dokumen	9	dokumen	100	%	9	dokumen	45	dokumen	1,00	%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat kepatuhan wajib Pajak Daerah	11,50	%		%	100	%	96,99	%	96,99	%	-	%	-	%	-	%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tunggakan pajak daerah	12	%			0,50		1,99		398,07							%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6	Laporan	30	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100	%	6	Laporan	36	Laporan	6,00	%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	121	layanan	484	layanan	121	layanan	121	layanan	100	%	121	layanan	605	layanan	5,00	%
Penagihan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	2	dokumen	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	10	dokumen	5,00	%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25	dokumen	100	dokumen	25	dokumen	25	dokumen	25	%	25	dokumen	125	dokumen	5,00	%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2	dokumen	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	10	dokumen	5,00	%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Laju Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	59,13	%		%	9,12	%	8,40	%	92,04	%	-	%	-	%	-	%

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kebijakan Data Kelola Pendapatan Asli Daerah	50	dokumen	dokumen	10	dokumen	10	dokumen	100	dokumen	dokumen	dokumen	%			
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	dokumen	8	dokumen	2	dokumen	dokumen	100	%	2	dokumen	10	dokumen	5,00	%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kibijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	5	dokumen	20	dokumen	5	dokumen	dokumen	100	%	5	dokumen	25	dokumen	5,00	%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12	dokumen	48	dokumen	12	dokumen	dokumen	100	%	12	dokumen	60	dokumen	5,00	%
Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Laporan	16	Laporan	4	Laporan	Laporan	100	%	4	Laporan	20	Laporan	5,00	%
Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	2,00	%

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sumbawa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya urusan pengelolaan pendapatan yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, Tingkat capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dilihat dari capaian realisasi tahun 2024 sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 2.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	A	BB	BB
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	69.479.876.571	81.549.176.162,20	104.703.921.182

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini terdapat isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu:

Tugas pokok dan Fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di b idang pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan Pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Bapenda Kabupaten Sumbawa maka harus dianalisis isi-isu yang akan dihadapi dan lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menanggapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan memperhatikan berupa identifikasi isu-isu dan permasalahan termasuk dalam hal pelayanan yang akan dihadapi pada waktu mendatang sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat menuju good governance dan clean government. Terkait dengan tugas dan fungsinya, maka Bapenda Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan dan menguatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan public.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu dipertimbangkan oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa yaitu sebagai berikut:

1. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali maksimal.

Daerah belum mampu mengidentifikasi dan menggali seluruh potensi PAD yang dimiliki, baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Potensi ini bisa berupa sektor ekonomi baru, objek pajak/retribusi yang belum terdata, atau aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif.

2. Basis data dan Sistem informasi PAD yang lemah;

Ketersediaan dan kualitas data wajib pajak atau wajib retribusi yang akurat dan terintegrasi seringkali masih menjadi kendala. Sistem informasi pengelolaan PAD yang belum memadai, seringkali manual atau tidak terhubung antarunit, menyebabkan kesulitan dalam pemantauan, penagihan, dan analisis potensi PAD

3. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi;

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat atau pelaku usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, persepsi negatif terhadap penggunaan dana daerah, atau penegakan hukum yang lemah.

4. Regulasi dan kebijakan PAD yang belum Optimal;

Peraturan daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi terkini, terlalu membebani, atau justru terlalu rendah tarifnya. Proses pembentukan dan revisi Perda yang lambat juga menjadi kendala. Selain itu, kebijakan insentif atau disinsentif untuk mendorong pembayaran PAD mungkin belum efektif.

5. Kapasitas SDM dan Teknologi Pengelola PAD yang terbatas;

Keterbatasan jumlah, kompetensi, dan integritas SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAD (mulai dari perencanaan, pemungutan, penagihan, hingga pengawasan) merupakan hambatan serius. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas juga berkontribusi pada masalah ini.

6. Pengembangan dan integritas informasi;

Tantangan dan peluang utama yang dihadapi dalam menciptakan, mengelola, dan melindungi data serta informasi agar tetap akurat, terpercaya, dan berguna

7. Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintahan dan tata Kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal.

pengelolaan kinerja instansi pemerintahan dan tata kelola birokrasi perangkat daerah mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Secara garis besar, masalah ini menghambat efektivitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan pembangunan.

Dampak dari isu-isu strategis tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang terdapat pada Bapenda Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Mengoptimalkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Pengelola PAD dengan meningkatkan kemampuan, keahlian dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan Bimtek, Diklat, Kursus atau sejenisnya sehingga dapat mengembangkan diri dalam pelayanan pajak daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Menciptakan, mengelola, dan melindungi data serta informasi agar tetap akurat, terpercaya, dan berguna.
4. Membuat kebijakan pencapaian terkait dengan perpajakan daerah maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak daerah.
5. Mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan pendapatan Asli daerah yang harus terus ditingkatkan.
6. Peningkatan Basis Data dan Sistem Informasi pengelolaan Pendapatan Asli daerah.

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang Dihadapi

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa secara proaktif mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar bagi Bapenda untuk merumuskan strategi dan solusi yang tepat, sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin efektif, efisien, dan memuaskan.

Rincian permasalahan pemerintahan dan birokrasi di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjukkan oleh Indeks Profesionalisme ASN masih rendah, terutama pada dimensi pendidikan dan kompetensi.
2. Pelayanan Publik belum sepenuhnya efisien dan efektif, ditandai dengan pemanfaatan IT (teknologi informasi) belum optimal.
3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan Eefektif.

4. Perencanaan pelayanan publik dan birokrasi belum optimal meliputi: perencanaan kinerja birokrasi, dokumen perencanaan yang berkualitas, perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil/manfaat, meningkatkan kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan, dan mekanisme cascade kinerja.
5. Pengawasan pemerintahan belum optimal meliputi: Pencapaian level kapabilitas APIP belum optimal, Formasi APIP yang bersertifikat auditor dan P2UPD masih rendah, dan Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal.
6. Sebagian besar pemerintahan/pembangunan desa tergolong desa berkembang, masih sedikit desa maju dan mandiri

Mengatasi permasalahan - permasalahan ini membutuhkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari Bapenda Kabupaten Sumbawa. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif, Bapenda dapat meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

Berikut ini kami sajikan pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

TABEL 2.3

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak.	kurangnya informasi, kompleksitas peraturan, atau kesadaran yang masih rendah.
			Belum optimalnya penggunaan kanal informasi dalam menunjang kecepatan penyampaian informasi
		Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegitas	Terbatasnya Tenaga Berkualifikasi tertentu (juru sita, penilai pajak dan PPNS).
			Manajemen pengelolaan yang belum maksimal.
		Proses Pelayanan yang Belum Sepenuhnya Efisien	proses pelayanan masih memerlukan waktu yang lama atau melibatkan prosedur yang kompleks

			Cakupan layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika belum optimal
		OPTimalisasi Penerimaan pajak yang belum intensif dan ekstensif	pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak yang belum dibayar
			Sistem pendataan wajib pajak belum komprehensif.
		Kendala dalam Pengawasan dan Penagihan	keterbatasan data, kesulitan akses ke Wajib Pajak, atau kurangnya koordinasi dengan pihak terkait
			Sarana prasarana pengawasan dan penagihan pajak daerah yang memenuhi standar masih kurang
		Sistem Informasi Belum sepenuhnya efektif dan efisien	Pemanfaatan IT (Teknologi Informasi) belum optimal.
			Integrasi implementasi data pajak belum optimal
Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	Kualitas Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintahan dan tata Kelola Birokrasi Perangkat daerah belum optimal		Penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi belum optimal
			Penerapan sistem informasi pelayanan perangkat daerah belum optimal

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa, dapat diketahui dengan melakukan

analisis dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)

Lingkungan Internal

● Kekuatan (Strength)

Adanya produk hukum berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan penerbitan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD maupun peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;

Letak geografis Kabupaten Sumbawa yang cukup strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki objek wisata dan Komoditi hasil Bumi. Hal ini dapat memberikan efek terhadap peningkatan pendapatan daerah;

Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang sesuai dengan analisis jabatan yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat selaku wajib pajak;

Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;

Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representative dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

● Kelemahan (Weakness)

Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan pajak daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa perda, perbup maupun keputusan Bupati sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja.

Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku.

Masih terdapat potensi pendapatan yang cukup besar, namun belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita, dengan kondisi jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan.

Lingkungan Eksternal

- Peluang (Opportunity):

Dampak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan pemungutan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah memberikan kewenangan pemungutan Opsen pajak PKB, BBNKB dan Pajak MBLB. Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak Provinsi. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD.

Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Kondisi di Kabupaten Sumbawa cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Sumbawa sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.

Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

Kerja sama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan provinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, BUMD lainnya, Pengusahan asosiasi dan tokoh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

- Ancaman (Threat):

Kesadaran masyarakat wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah.

Penerapan Sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan kepada wajib pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengakibatkan penurunan pembayaran pajak daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan repretasi tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan , sub kegiatan serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen

kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan, sub kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitannya dengan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat beberapa perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya. Hasil analisis terhadap Rancangan Akhir kegiatan tersebut hingga menjadi Renja yang siap untuk difinalisasi dalam RKPD tersaji pada Tabel TC.31 berikut ini:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PEN TING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja(Outcome)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota		Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	72,26%	12.714.486.331	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bapenda	Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	75,40%	12.714.486.331		
1	Perencaanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran Bapenda	100%	120.471.884	Perencaanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran Bapenda	100%	120.471.884		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.035.524	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.035.524		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.622.450	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.622.450		

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.268.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.268.900		
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.386.410	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.386.410		
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi6Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.393.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi6Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.393.400		
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	7 Laporan	32.310.300	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	7 Laporan	32.310.300		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	49.454.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	49.454.900		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi keuangan Bapenda	100%	10.787.993.500	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi keuangan Bapenda	100%	10.787.993.500		

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 org/bln	10.747.789.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 org/bln	10.747.789.600		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	5.846.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	5.846.500		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	15.636.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	15.636.500		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.698.200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.698.200		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	4.371.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	4.371.400		
6	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bapenda	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	2.461.800	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bapenda	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	2.461.800		
7	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan	8 Laporan	3.602.500	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan	8 Laporan	3.602.500		

			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	1 Dokumen	4.587.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	1 Dokumen	4.587.000		
3	Administrasi Barang Milik Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi BMD Bapenda	100%	5.431.140	Administrasi Barang Milik Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi BMD Bapenda	100%	5.431.140		
1	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	3.771.240	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	3.771.240		
2	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.659.900	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.659.900		
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		persentase capaian target pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan PD	100%	36.602.500	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		persentase capaian target pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan PD	100%	36.602.500		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 Laporan	36.602.500	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	36.602.500		
6	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen	100%	531.574.532	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%	531.574.532		

			administrasi umum perangkat daerah									
1	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.048.762	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.048.762		
2	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Bapenda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	265.198.670	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Bapenda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	265.198.670	sub kegiatan baru	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	32 Kali	39.986.100	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	32 Kali	39.986.100		
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	217.343.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	217.343.500		
5	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2.997.500	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2.997.500		
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemda	100%	778.646.000	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemda	100%	778.646.000		
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan	15.210.800	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan	15.210.800		